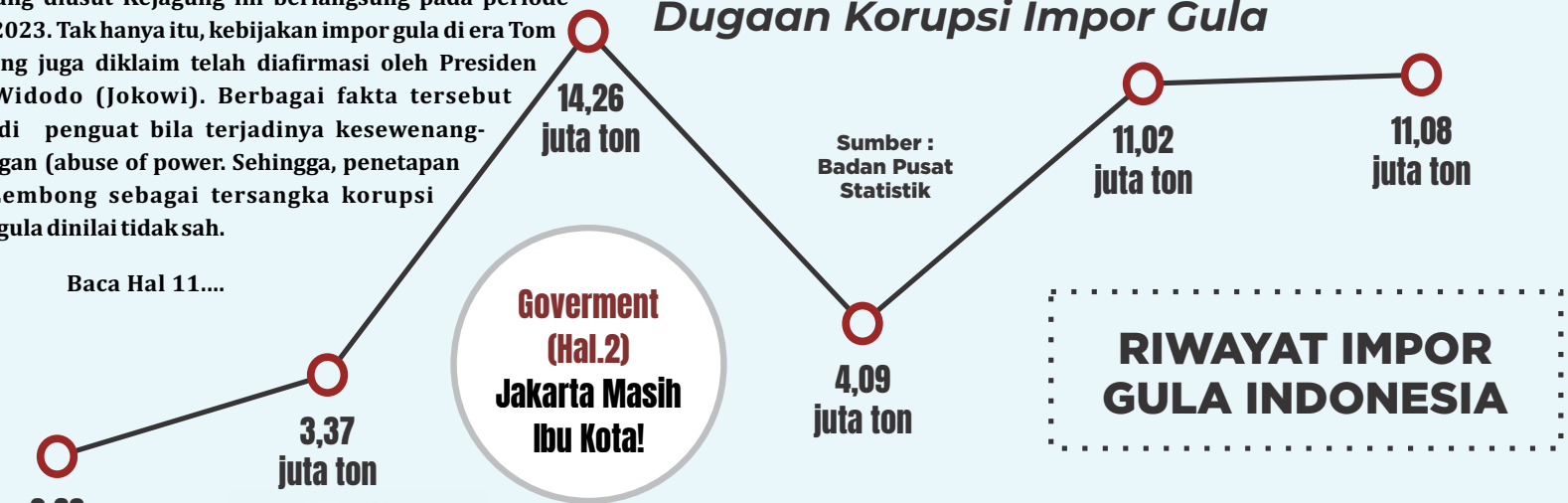


Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 Thomas Lembong, tersangka kasus korupsi impor gula 'menyeret' 5 nama Mendag lain saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024). Kelima eks-Mendag lain yang dimaksud, yakni: Rachmad Gobel (2014-2015); Enggartiasto Lukita (2016-2019); Agus Suparmanto (2019-2020); Muhammad Lutfi (2020-2022); dan Zulkifli Hasan (2022-2024). Nama-nama itu dinilai perlu dimintai keterangannya, sebab perkara dugaan korupsi impor gula yang diusut Kejagung ini berlangsung pada periode 2015-2023. Tak hanya itu, kebijakan impor gula di era Tom Lembong juga diklaim telah diafirmasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbagai fakta tersebut menjadi penguat bila terjadinya kesewenang-wenangan (abuse of power. Sehingga, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula dinilai tidak sah.

Baca Hal 11....

TOM LEMBONG 'SERET' 5 NAMA MANTAN MENDAG

Dugaan Korupsi Impor Gula



**RIWAYAT IMPOR
GULA INDONESIA**



Rachmad Gobel
(2014-2015)

Thomas Lembong
(2015-2016)

Enggartiasto Lukita
(2016-2019)

Agus Suparmanto
(2019-2020)

Muhammad Lutfi
(2020-2022)

Zulkifli Hasan
(2022-2024).

Jakarta Masih Ibu Kota!

PERATURAN PELAKSANA YANG HARUS DISESUAIKAN

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- PP Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
- Perpres Nomor 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
- Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

JAKARTA-Meskipun saat ini sudah ada Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pemerintah menegaskan Jakarta masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Supratman mengatakan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan berlaku setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

"Di UU DKJ itu dinyatakan UU ini berlaku sejak ditandatangani ya, keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota. Jadi sepanjang Keppresnya belum ditandatangani artinya ibu kota RI itu adalah DKI Jakarta ya kan, Jakarta maksudnya," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Supratman mengatakan perubahan nomenklatur akan mengikuti keputusan presiden. Kendati demikian, Revisi UU DKJ yang sedang dibahas oleh DPR RI untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum.

"Karena itu kita mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti begitu Keppres ditandatangani, sekarang kan pemilihan masih Gubernur DKI Jakarta tapi kalau nanti perubahan



Pekerja mengoperasikan alat berat saat menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/11/2024). (ANTARA)

nomenklaturnya setelah Keppres kan harusnya Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Ya kan," ujar Supratman.

"Begitu juga anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, daerah pemilihan DPD-nya itu sama. Nah memang yang memang kemarin terlewat itu sehingga perlu untuk disempurnakan untuk mengantisipasi supaya jangan ada kekosongan hukum nantinya," tambahnya.

Ia menegaskan UU DKJ akan berlaku usai Presiden Prabowo menandatangani Keppres. Ia menyebut adanya revisi UU DKJ agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

"Loh kan di UU DKJ itu dinyatakan berlaku setelah Keppresnya ditandatangani. Ya kan. sehingga jg proses pemilihannya saat ini adalah memilih Gubernur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Itu masih seperti itu," tutur Supratman.

"Ini cuma antisipasi jangan sampai karena kan menjelang pemilu nih. Menjelang Pilkada di tanggal 27 supaya tidak menimbulkan kesimpangsiuran ini yang dipilih gubernurnya siapa, gubernur daerah mana sudah jelas bahwa yang dipilih itu Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tapi, otomatis setelah Keppresnya ditandatangani nomenklatur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta beralih menjadi Daerah Khusus Jakarta," imbuhnya.

Senada Tito mengatakan, Ibu Kota Negara saat ini masih berkedudukan di Jakarta. Dia merujuk salah satu bunyi klausul dalam UU IKN yang menyebutkan Ibu Kota secara definitif baru akan pindah setelah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di Undang-Undang IKN, bahwa status ibu kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan keputusan presiden," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin (18/11/2024).

Dengan begitu, Tito juga menegaskan status Jakarta maupun gubernur yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 masih sebagai gubernur DKI Jakarta. Begitu pula dengan status DPRD, DPD, maupun anggota DPR yang berasal dari Jakarta.

"Nah sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN-nya dengan

Perpres, gubernurnya namanya gubernur DKI, DPRDnya DPRD DKI, kemudian yang lain juga DPD RI DPR RI daerah pemilihan DKI," katanya.

Tito belum dapat memastikan kapan Keppres atau Perpres IKN akan keluar. Menurut dia, keputusan itu tergantung sepenuhnya pada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, mengutip sejumlah pernyataan Presiden, kata Tito, penerbitan Perpres IKN berpeluang baru akan dilakukan setelah infrastruktur rampung. Termasuk pembangunan gedung-gedung yudikatif dan legislatif.

"Beliau menginginkan juga ada yudikatifnya, Mahkamah Agung gitu ya. Kemudian ada legislatifnya untuk Parlemen, DPD, DPR RI, MPR, biar sehingga menjadi satu kesatuan lengkap," katanya.

Diketahui, Ombudsman RI meminta Pemerintah untuk melakukan harmonisasi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah diubah menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Hal itu menjadi salah satu temuan Ombudsman RI tentang pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN Tahap I periode tahun 2020-2024.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menjelaskan, dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2023 tertulis pada saat UU Nomor 21 Tahun 2023 mulai berlaku, peraturan pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 dan wajib disesuaikan paling lama dua bulan sejak UU Nomor 21 Tahun 2023 diundangkan.

"Namun masih terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang belum disesuaikan dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional II Tahun 2024 Ombudsman RI, Senin (18/11/2024).

Untuk itu, Ombudsman RI meminta Menteri Hukum, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Otorita IKN (OIKN) berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksana UU Nomor 3 Tahun 2022 dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023. Kemudian, juga menerapkan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023 dengan memperhatikan keberlakuan regulasi di sektor terkait lainnya seperti perizinan dan tata ruang.

2025 ASN Pindah, 2028 Bangun Gedung DPR

Terpisah, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN.

Ia mengatakan, arahan Prabowo itu terbagi ke dalam 2 periode, yakni arah pembangunan untuk 2025, serta 2028. Khusus untuk 2025 ialah fokus untuk pemindahan ASN ke IKN.

"Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo timelinenya ada dua, 2025 dan 2028. 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri PANRB tentang kepastian kepindahan awal dari ASN," kata Basuki di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Khusus untuk pemindahan ASN ke IKN pada awal 2024, ia katakan menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di IKN. Untuk hunian, Basuki mengatakan sudah siap 47 tower bagi ASN. Begitu juga perkantorrannya dan ekosistem pendukungnya.

"Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua. Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," ucap Basuki.

Namun, untuk jumlah ASN yang akan dipindah secara bertahap mulai 2025, Basuki mengatakan, tergantung keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

"Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya. Jadi tergantung MenPAN," tutur Basuki.

Ia mengakui, untuk hunian dan perkantoran yang tersedia sebetulnya masih sesuai perencanaan awal, yakni sesuai dengan jumlah Kabinet Indonesia Maju masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sebanyak 36 kementerian.

Maka, untuk menyesuaikan jumlah Kabinet Merah Putih yang sebanyak 48 kementerian, ia pastikan akan ada pembangunan lagi khusus hunian maupun perkantorrannya. (tar, ist, ant/dya)

Legislator Tantang Capim KPK Tolak Intervensi Penguasa

JAKARTA-Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiando ditantang berani atau menolak intervensi penguasa bila terpilih menjadi pimpinan lembaga antirasuah.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR Benny K Harman saat proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK periode 2024-2029. Benny awalnya menyinggung bahwa pimpinan KPK mudah diintervensi ketika menangani kasus. Dia menilai tak jarang ada permintaan untuk menjerat seseorang.

"Pimpinan KPK rawan diintervensi oleh kekuasaan. Apabila diperintahkan, supaya si A ditetapkan sebagai tersangka korupsinya, memang gampang sekali, tapi si yang punya kuasa tadi 'ini dokumennya, ini buktinya,'" kata Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Setyo ditanyakan bila menghadapi situasi tersebut. "Apakah saudara menolaknya atau saudara melaksanakannya dengan baik perintahnya?" tanya Benny

Politikus Partai Demokrat itu juga menanyakan sikap Setyo jika ada calon tersangka korupsi yang berusaha ingin berkomunikasi dengannya. Bahkan, bertemu dengan orang tersebut baik secara langsung atau perantara.

"Tiba-tiba si calon tadi mengontak Anda melalui Anda punya tangan kanan, tangan kiri, ketemu. Menurut saudara itu diperbolehkan dibenarkan, dilayani atau tidak?" tanya Benny.

Benny juga mencesar Setyo ihwal operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh KPK hingga Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. "Dulu pernah ada pimpinan KPK yang lama menilai episentrum itu ada di parlemen setelah itu berubah makanya saya tanya episentrum itu dimana," ujar Benny.

Pada kesempatan terpisah, Setyo mengatakan soal RUU Perampasan Aset merupakan urusan DPR. KPK, kata dia, hanya tinggal ikuti implementasi. Setyo juga menekankan bahwa ingin penegak hukum bertugas sesuai dengan kapasitasnya. Dia tak ingin adanya egosektoral.

"Ya, prinsipnya seperti ini. Bahwa saya tidak ingin bahwa penegak hukum itu berjalan masing-masing. Saya berharap bahwa masing-masing penegak hukum itu bisa berjalan secara bersama-sama," ucap dia.

LHKPN Terasa Hanya Formalitas
Sementara capim KP lainnya,



Suasana uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK yang digelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Ant)

Michael Rolandi Cesnanta Brata menilai, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) saat ini masih menjadi formalitas belaka. "Saat ini dirasakan menyampaikan LHKPN itu hanya formalitas ketika tanggal 31 Maret disampaikan, tetapi tidak isi kualitas penyampaiannya itu menjadi penyampaian dalam hal kualitas apa yang dilaporkan," kata Michael dalam uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Oleh karenanya, Michael berjanji akan meningkatkan kualitas LHKPN sebagai upaya meningkatkan kualitas tindakan pencegahan korupsi.

Hal ini ia masukkan dalam salah satu misinya sebagai capim KPK. "Nah ini menurut saya suatu bahan atau bagian dalam melakukan pencegahan yang penting," ujar pejabat Pemerintah Provinsi Jakarta itu.

Guna meningkatkan kualitas pencegahan, Michael juga akan mendorong terciptanya deteksi dini berupa aplikasi terkait korupsi, khususnya untuk diterapkan di daerah. Menurut dia, adanya platform deteksi dini dapat mencegah terjadi penyimpangan mulai dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Baca juga: DPR Sebut KPK Tak Lagi Dipercaya Rakyat, Capim Singgung Persoalan Integritas

"Instrumen di daerah kita masih belum mempunyai sistem informasi yang terintegrasi. Ini juga akan dikembangkan menjadi continuous audit, continuous monitoring," ujar Michael.

Selain itu, ia juga akan memasukan pendidikan antikorupsi di kurikulum sekolah. "Memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk membentuk generasi yang berintegritas," kata Michael.

Di kesempatan sama, Capim KPK, Fitroh Rohcahyanto menilai, jika Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Tipikor sangat rawan diterapkan.

Sebab menurutnya, ada diksi yang dianggap multitafsir dalam salah satu pasal.

"Saya harus mengakui bahwa pasal 2, pasal 3 ini sangat rawan. Kenapa? Di sana ada bahasa yang kemudian bisa cara pandangnya berbeda. 'Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.' Pertanyaannya, ada tidak setiap pengadaan, apapun pengadaan, tidak ada orang yang untung? Pasti semua ada orang untung," kata Fitroh.

Menurutnya, dalam konteks korupsi keuntungan yang diperoleh seseorang itu bukan akibat, melainkan sebuah tujuan. Untuk itu, jika keuntungan dinilai menjadi sebuah akibat, akan ada banyak orang yang masuk penjara.

"Makanya kemudian seperti saya pelajari korupsi, pasal 2, pasal 3 itu hanya ada di Indonesia. Akibat korupsi semuanya kan suap. Jadi kalau pasal 2, pasal 3 cara pandangnya adalah tujuan, di sana untuk menguntungkan dirinya atau untuk menuntungkan orang lain atau untuk menguntungkan korporasi dengan cara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara, pasti benar," terangnya.

"Tetapi kalau sudut pandangnya kemudian yang penting ada kerugian negara, yang penting ada orang lain hukum, ini sangat bahaya. Makanya saya kalau pasal 2, pasal 3 sangat ketat untuk mencari mens rea. Tidak ada pidana tanpa mens rea, kecuali pidana lalai," sambungnya.

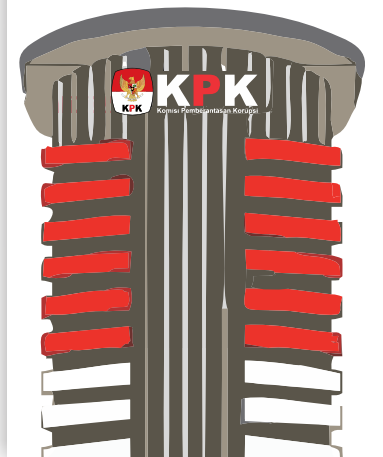
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsuet) menuturkan, politik berbiaya tinggi yang terjadi saat ini di Indonesia menjadi salah satu biang kerok penyebab korupsi. Khususnya oleh pejabat publik yang terpilih melalui pemilihan langsung, termasuk Pilkada.

Berdasarkan data KPK, dari 2004 hingga 2023, anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi mencapai 344 orang. Dalam waktu yang sama, sebanyak 161 bupati/wali kota dan 24 gubernur juga terjerat kasus korupsi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar

Harta 10 Capim KPK

	Michael Rolandi Cesnanta Brata Rp 18.937.154.926
	Agus Joko Pramono Rp 18.607.156.521
	Johanis Tanak Rp 11.211.550.499
	Setyo Budiando Rp 9.611.000.000
	Fitroh Rohcahyanto Rp 5.057.000.000
	Ibnu Basuki Widodo Rp 4.191.606.703
	Ida Budhiati Rp 2.627.131.805
	Ahmad Alamsyah Saragih Rp 1.129.182.876
	Djoko Poerwanto Rp 926.000.000
	Poengky Indarti Rp 558.654.800



ini menerangkan, sistem demokrasi pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat, ataupun legislatif sangat rentan dengan money politics dan biaya tinggi. Hal ini sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi.

"Karena, saat maju dalam pemilihan memerlukan biaya yang tinggi, maka saat terpilih mereka terkadang menghalalkan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkan bisa kembali," ujar Bamsuet, dalam fit and proper test Calon Pimpinan (Capim) KPK, di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (18/11/2024). (tar, ant, rls/dya)

Debat Pamungkas Pilgub Jatim

Semua Kandidat Tebar Janji Lingkungan hingga Ekonomi

SURABAYA-Tiga pasangan calon Gubernur Jatim menebar janji pada debat pamungkas Pilgub Jatim 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Senin (18/11) malam.

Pasangan nomor urut satu Luluk Nur Hamida-Lukmanul Hakim menyoroti terkaitnya banyak sekolah yang rusak di Jatim serta pencemaran lingkungan di Jatim.

Ke depan, keduanya berjanji akan memperbaiki seluruh kerusakan tersebut termasuk memperbaiki pencemaran lingkungan hidup. "Kita akan normalisasi Sungai Brantas," katanya.

Terkait upaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Luluk Nur Hamidah, paslon nomor urut 1 yang mendapat kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan itu, menyatakan bahwa sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah jelas bahwa penanggung jawab adalah pemerintah provinsi.

Untuk itu, kata Luluk, Pemprov Jatim harus berkomitmen melaksanakan UU tersebut dengan posisi berpihak kepada mereka yang dirugikan dan berdampak perusakan lingkungan.

"Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus memiliki komitmen melaksanakan UU ini dengan posisi berpihak kepada siapa yang dirugikan dan berdampak," ungkapnya.

Luluk berjanji bila menjadi gubernur, ia tidak akan pandang bulu untuk menegakkan hukum terhadap para perusak lingkungan.

Mengenai jalan tol, Cawagub nomor urut 01 Lukmanul Khakim menyebut, harus ada exit tol di setiap kabupaten/kota yang dilintasi tol.

"Misalnya di Magetan, kami ingin

seluruh kabupaten yang ada di Jawa timur yang dilintasi oleh tol, harus ada pintu exit tolnya. Dengan demikian, di setiap sudut itu bisa menjadi kawasan untuk pertemuan ekonomi dengan menghadirkan produk unggulan kabupaten di masing-masing kabupaten yang ada di Jawa timur yang dilintasi oleh tol. Karena dengan begitu, maka banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh manfaat untuk membangun ekonomi, menjual produk yang dihasilkan dari masing-masing kabupaten," jelas Lukman.

Sementara itu, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak lebih banyak menge-depankan prestasi yang selama ini sudah diraih, khususnya pembangunan infrastruktur.

Jalan Trans Jawa Timur yang sudah dibangun di lima koridor masih menjadi andalan, dan akan dikembangkan di sejumlah kota lain seperti Malang Raya, Jember Raya.

Emil membeberkan, pihaknya justru ingin memperlebar jalan nasional di Probolinggo-Lumajang.

"Karena realitanya, kita mengetahui bahwa ada tekanan finansial sangat kuat kepada perusahaan-perusahaan konstruksi jalan tol, namun demikian ini bukan kabar yang sepenuhnya menyedihkan masyarakat, karena dari Besuki ini artinya dari exit tol tersebut bisa mengakses ke Bondowoso di selatan dan ke Jember yang jaraknya dekat dan ke Situbondo dan Asembagus," bebrnyanya.

"Pelaku UMKM di Bondowoso, mereka sudah berminat untuk mengembangkan Arak-arak. Oleh karena itu, tentunya keberadaan tol seperti yang dialami Madiun dan Nganjuk, itu justru membuka ruang untuk industri padat karya berkembang jadi pembangunan tol yang sebenarnya menciptakan



Tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), dan Luluk Nur Hamida-Lukmanul Khakim (dari kiri ke kanan), saat Debat Publik Pilgub Jatim 2024 ketiga di Grand City, Surabaya, Senin (18/11/2024). (ist)

peluang baru," imbuhnya.

Di bidang lingkungan, Khofifah memaparkan bahwa selama pemerintahannya bersama Emil, mereka telah menindak berbagai perusahaan yang melanggar lingkungan.

"Pada proses pemerintahan Khofifah-Emil selama lima tahun berjalan, ada 300 perusahaan yang dalam pengawasan tidak langsung, ada 89 perusahaan dalam pengawasan langsung, dan di antaranya ada 10 yang terkena hukuman pidana, 12 perdata, dan 60 sanksi administratif," ungkapnya.

Menurut Khofifah, dibutuhkan peran serta semua pihak dan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan UU tersebut.

Tidak mau kalah pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) akan membangun tanggul di pantai untuk menahan terjadinya rob di sepanjang pantai di Jatim.

Risma juga akan mengembangkan embung-embung di sejumlah daerah guna menampung air hujan sehingga petani tidak mengalami kekurangan air saat kemarau.

Dia juga menyebut indeks kualitas lingkungan hidup ditentukan oleh kualitas udara, air, dan lahan.

Menurutnya, penegakan hukum lingkungan sudah diatur ketentuannya dalam Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

"Untuk itu, Pemprov Jatim bisa memberikan pengawasan di awal administratif untuk mencegah kerusakan lingkungan," ucap Risma.

Sementara itu, Cawagub nomor urut 03 Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans menanggapi pernyataan Emil dengan membeberkan problem dari dibangunnya jalan tol.

"Problemnya adalah bagaimana masyarakat lokal merespons itu dengan baik dan itu tergantung dari kesadaran pemerintah, andaikan saja di setiap rest area itu harus dimunculkan produk lokal, ini akan membantu masyarakat lokal agar bisa tumbuh kembang, ini yang menjadi fokus kita semua," beber Gus Hans.

"Saya kira jalan tol ini bukan satu-satunya jalan untuk membangun transportasi yang ada di Jawa timur, justru misalnya kita memanfaatkan untuk melebarkan jalan yang non tol, yang harus kita perhatikan agar masyarakat bisa merasakan akses yang maksimal tanpa terganggu dengan regulasi yang lain," imbuhnya. (pra, ist, ant/dya)

Agar Tak Bias, Revisi UU Pemilu dan Pilkada Masuk Prolegnas Prioritas 2025



Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia

JAKARTA- Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dan Pemilu disepakati masuk ke dalam daftar program

legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025 dalam rapat Badan Legislasi (Baleg).

Di awal, revisi dua undang-undang tersebut masuk ke dalam revisi bersifat kumulatif terbuka untuk menyesuaikan beberapa pasal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia memberi usul agar revisi itu dilakukan secara menyeluruh demi perbaikan sistem pemilu dan pilkada yang utuh, tidak sepotong-sepotong.

Ia juga menyinggung bahwa revisi tersebut perlu dilakukan dalam waktu dekat dan jangan mepep-mepep dengan waktu penyelenggaraan pemilu. "Kita akan lebih nyaman, lebih bebas gitu ya, lebih obyektif kalau Undang-Undang Pemilu itu dibahas di awal pemerintahan, supaya tidak ada bias pada saat nanti menjelang pemilu," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (18/11/2024).

Mengenai kemungkinan kedua UU itu kelak akan dibuat dalam bentuk omnibus atau tetap berdiri sendiri-sendiri, Doli mengatakan bahwa itu akan sangat tergantung dalam dinamika pembahasan ke depan. Politikus Golkar itu menegaskan

bahwa sebelumnya memang ada pendapat agar dua UU itu dijadikan satu paket omnibus bersama UU tentang Partai Politik.

Hal yang jelas, menurut dia, dengan dibahas pada 2025, hasil revisi UU Pilkada dan Pemilu punya waktu yang cukup panjang untuk dimatangkan dan disosialisasikan sebelum pemilu berikutnya pada 2029.

"Tu memberikan kita kebebasan, memberikan kita keleluasaan untuk berekspresi, kemudian mencari alternatif-alternatif terbaik, sistem politik, sistem demokrasi, termasuk sistem pemilu apa yang paling ideal buat Indonesia," ucap eks Ketua Komisi II DPR RI tersebut. (tar, ist, ant/dya)

Kasus Suap Proyek Pemprov Kalsel

Sahbirin Noor Mangkir dari Panggilan KPK, Hilang Lagi?



Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berpamitan kepada ASN lingkup Pemprov Kalsel usai menyatakan diri mundur dari jabatan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/11/2024). (Dok. ant)

JAKARTA - Sahbirin Noor atau Paman Birin hari ini dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap proyek di Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, Sahbirin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

"Sampai dengan saat ini yang bersangkutan tidak hadir sesuai surat panggilan sebagai saksi yang telah dilayangkan penyidik," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (18/11/2024).

Tessa mengatakan Sahbirin tidak memberikan alasan terkait ketidakhadirannya dalam panggilan hari ini. KPK segera menjadwalkan pemeriksaan ulang kepada Sahbirin.

"Tidak memberikan alasan ketidakhadirannya," ujar Tessa.

"KPK meminta saudara SN untuk kooperatif dan dapat hadir pada

panggilan yang akan diadwalkan selanjutnya," tambah Tessa.

KPK sempat menetapkan Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Pemprov Kalsel. Dia diduga menerima aliran uang korupsi.

Dalam konferensi pers kasus tersebut pada 8 Oktober 2024, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufroon mengumumkan ada tujuh orang yang ditetapkan sebagai

tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel.

Paman Birin lalu melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim lalu memutuskan untuk menerima gugatan dari Paman Birin. Status tersangkanya pun gugur.

Selang beberapa hari menang praperadilan, Sahbirin Noor kemudian mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalsel pada tanggal 13 November 2024 setelah menjabat selama 8 tahun dan Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Sahbirin Noor.

Dalam suratnya, Sahbirin menyatakan mundur demi menjaga kondusivitas pemerintahan di Kalsel. Surat pengunduran diri itu telah disampaikan kepada Presiden dan

Menteri Dalam Negeri.

KPK mengatakan penyidikan kepada Paman Birin tidak berhenti meski ia telah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Proses hukum tidak terganggu bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri itu sama sekali tidak mengganggu, karena tindakan tersebut dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai penyelenggaraan negara. Jadi bukan berarti kalau mengundurkan diri itu hilang perbuatannya, karena sudah terjadi perbuatan tersebut," kata Tessa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

Dia juga mengatakan bahwa pencakalan atau larangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin masih berlaku. "Larangan ke luar negeri masih berlaku," katanya.

Tessa mengemukakan bahwa pemberlakuan larangan keluar negeri tersebut tidak terpengaruh dengan gugurnya status tersangka terhadap yang bersangkutan lewat proses praperadilan.

Larangan bepergian terhadap Sahbirin Noor diberlakukan oleh penyidik KPK sejak 7 Oktober 2024 dan berlaku selama 6 bulan.

Capim KPK Sebut Memalukan

Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti menanggapi

pertanyaan Komisi III DPR RI yang menyinggung kalahnya lembaga antirasuah dalam praperadilan tersangka korupsi, salah satunya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

"Terkait dengan pertanyaan Gubernur Kalimantan Selatan bisa bebas ya, praperadilannya kalah KPK. Saya rasa ini sangat memalukan," tutur Poengky dalam fit and proper test capim KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Dia menyebut, kalahnya KPK dalam gugatan praperadilan tersangka korupsi harus menjadi bahan evaluasi serius. Poengky bahkan menduga adanya penguasaan hukum yang tidak menyeluruh.

"Jangan sampai dalam kasus-kasus ke depan KPK kalah terus. Jadi ini kan berarti penguasaan hukumnya juga bermasalah. Terus kemudian terkait dengan upaya-upaya formilnya juga salah ya, jangan sampai ini terjadi lagi," kata dia.

Awalnya, anggota Komisi III DPR RI Frederik Kalalembang meminta pendapat Poengky terkait kalahnya KPK dalam gugatan praperadilan tersangka Sahbirin Noor.

"Seperti yang baru-baru terjadi kasus praperadilan Gubernur Kalsel, kita tau bahwa KPK sudah menetapkan tersangka pada gubernur, dan kemudian tentunya dengan penetapan tersangka ini sudah mencukupi dua alat bukti. Itu menurut KPK," ujar Frederik. (wid, rls, ant/dya)

MA Putuskan Tak Ada Pelanggaran Etik Majelis Kasasi Ronald Tannur

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) oleh majelis hakim kasasi yang memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur (31).

Hal ini berdasarkan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang sebelumnya telah dibentuk untuk mendalami dugaan suap.

"Kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis kasasi perkara Nomor 1466/K/Pid/2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup," kata Juru Bicara MA Yanto kepada wartawan, Senin (18/11/2024).

Yanto menerangkan pemeriksaan dilakukan oleh tim secara maraton sejak 4 November hingga 12 November.

Yanto menyebut tim telah memeriksa mantan pejabat MA Zarof Ricar (ZR) pada 4 November di Kejaksaan Agung (Kejagung). Pemeriksaan ini turut dihadiri oleh dua orang jaksa dari Kejagung.

Kemudian, pemeriksaan terhadap pihak terkait dan tiga hakim agung majelis kasasi dilakukan pada 12 November di MA. Tiga hakim agung majelis kasasi yang diperiksa ini adalah S, AM, dan ST.

Yanto membeberkan dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa hakim agung S sempat bertemu dengan ZR pada 27 September.

"Hanya hakim agung S yang pernah bertemu dengan ZR, pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuhan guru besar honoris causa di UNM Makassar pada tanggal 27 September 2024," ujarnya.

Yanto menyebut dalam pertemuan itu kapasitas keduanya merupakan tamu undangan. Pertemuan itu, kata dia, juga berlangsung secara singkat.

Yanto mengungkapkan dalam pertemuan itu ZR sempat menyinggung perkara Ronald Tannur kepada hakim agung S. Namun, tidak ditanggapi.

"Pada pertemuan accidental dan berlangsung singkat tersebut ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tannur, tetapi tidak ditanggapi

oleh hakim agung S dan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Yanto menyampaikan dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa dua hakim agung lainnya yakni A dan ST tidak dikenal oleh ZR.

"Adapun hakim agung A dan ST tidak dikenal oleh ZR dan tidak pernah bertemu dengan ZR," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan eks Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar dan pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka kasus pemufakatan jahat suap dan gratifikasi pengurusan vonis Ronald Tannur di Mahkamah Agung.

Keduanya dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat suap agar putusan kasasi juga turut membebaskan Ronald Tannur. Dalam kesepakatannya, Lisa menjanjikan biaya pengurusan perkara sebesar Rp1 miliar untuk Zarof.



Ronald Tannur tersangka kasus tewasnya Dini Sera saat dibawa ke hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. (Ist)

Sementara itu biaya suap sebesar Rp5 miliar untuk ketiga hakim yang mengurus perkara Ronald Tannur juga telah diserahkan dari Lisa kepada Zarof. Namun uang itu belum sempat diserahkan dan masih berada di rumah Zarof.

Terkait kasus Ronald Tannur juga, Kejagung mendalami dugaan keterlibatan Mirizka Widjaja selaku ibu dalam rencana pemufakatan suap vonis kasasi. (wid, rls, ist/ dya)

Masih Ada 6 Faskes dan Sekolah di Kabupaten Malang Terdampak Kekeringan

MALANG - Sejak awal September 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang telah menyalurkan lebih dari 5 juta liter air bersih ke 7 kecamatan terdampak kekeringan. Namun, 6 fasilitas kesehatan (faskes) dan lembaga pendidikan, hingga kini ternyata masih mengalami keterbatasan akses air bersih.

"Dari data yang dihimpun per 17 November kemarin, kami sudah menyalurkan sebanyak 5.166.650 liter air bersih sejak 4 September 2024. Penyaluran ini untuk 18 Desa di 7 Kecamatan dengan jumlah penerima manfaat kurang lebih ada 5.283 KK, atau sekitar 16.051 jiwa," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Senin (18/11/2024).

Sadono mengatakan, sebaran distribusi air bersih mencakup desa-desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Donomulyo, Gondanglegi, Bantur, Kalipare, Gedangan, dan Pagak.

Dalam sehari, menurutnya BPBD mampu menyalurkan hingga 70.000 liter air bersih menggunakan armada

tangki yang dimiliki. "Jadi, selain rumah tangga, juga ada 2 fasilitas kesehatan (puskesmas), kemudian 3 lembaga pendidikan yang juga terdampak kekeringan. Kami terus melakukan upaya pendistribusian untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari," katanya.

Disebutkannya, faskes yang terdampak meliputi Puskesmas Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan serta Puskesmas Donomulyo di Kecamatan Donomulyo.

Sementara itu, lembaga pendidikan yang juga terdampak yaitu SMPN 2 Pagak di Kecamatan Pagak, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 4 Harjokuncaran serta Pondok Pesantren Raudlatul Muttaqin yang berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Pondok Pesantren Asy-Syadzili IV di Kecamatan Gondanglegi.

"Setiap fasilitas ini menerima pasokan air bersih dengan volume bervariasi, mulai dari 5.000 hingga 10.000 liter, namun kebutuhan air untuk operasional sehari-hari tetap sulit terpenuhi," bebernya.

Sadono menyampaikan, meskipun saat ini telah memasuki musim hujan,



Pendistribusian air bersih di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. (dok. BPBD Kab Malang)

namun curah hujan yang turun masih belum merata di se-luruh wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya, hujan baru terjadi di beberapa wilayah dan belum berlangsung setiap hari. "Masih spot-spot, belum setiap hari," katanya.

Sadono juga menambahkan, untuk mengakhiri dampak kekeringan, suatu wilayah ideal-nya membutuhkan hujan yang konsisten selama 1-2 minggu berturut-turut. Hal ini memungkinkan tanah menyerap air dalam jumlah besar, mengisi ulang sumber-sumber air serta

membantu pemulihan kebutuhan air bersih bagi wilayah yang terdampak.

Karena kondisi tersebut, Sadono menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memutuskan untuk memperpanjang status darurat kekeringan hingga 30 November 2024.

"Betul (status darurat kekeringan diperpanjang). Awalnya kan sampai Oktober kemarin. Ini dilakukan untuk memastikan distribusi air bersih tetap berjalan dan masyarakat sudah tidak terdampak kekeringan lagi," tukasnya. (Santi/Dya)

Pj Wali Kota Malang Pastikan APBD Sehat Meski Target PAD 2025 Turun Rp 160 Miliar



(Ilustrasi) Badan pendapatan daerah (Bapenda) Kota Malang saat melakukan sidak e-Tax di salah satu restoran beberapa waktu lalu. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp 1,17 triliun, target ini disesuaikan menjadi Rp 1,01 triliun.

Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, memastikan langkah ini dilakukan untuk menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang lebih sehat dan realistis.

lapangan, menghindari defisit anggaran, dan memastikan pengelolaan anggaran daerah yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, menurutnya dalam rincian pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Malang, penurunan target PAD ini mengikuti target pendapatan pajak daerah. Yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp 1 triliun, mengalami penyesuaian menjadi Rp 840 miliar.

"Kami ingin ini menjadi APBD

sehat, jadi bukan berdasarkan perencanaan kebutuhan dari masing-masing OPD. Tapi berdasarkan target capaian proyeksi yang memang trennya kita ketahui bersama. Ini tidak lagi kita bicara berdasarkan kebutuhan tetapi berdasarkan pendapatan yang kita bisa realisasikan untuk 2025," paparnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, mendukung penyesuaian ini, meskipun sejumlah fraksi menggarisbawahi pentingnya analisis yang lebih kuat terhadap sumber PAD.

Menurut perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini, penurunan target PAD perlu dilakukan dengan dasar yang jelas untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat.

"Penyesuaian target ini kan mempertimbangkan panduan MCP KPK yang mengharuskan pendapatan daerah dicatat melalui Surat Keputusan (SK). Jika tidak sesuai dengan realisasi, ada potensi sanksi. Karena itu, penting bagi Pemkot melampirkan hasil feasibility study (FS) terkait sumber PAD agar proyeksinya lebih realistis," ujar Mia.

Mia menambahkan, DPRD juga akan tetap mendorong Pemkot Malang untuk memaksimalkan potensi PAD yang ada. (Santi/Dya)



Target PAD ini kami susun tidak lagi berdasarkan penyusunan perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kami lebih berdasarkan kepada penyusunan program-program berdasarkan pendapatan, target pendapatan,"

IWAN KURNIAWAN
Pj Wali Kota Malang,

Wamildan Tsani

Dirut Baru Garuda Indonesia Pilihan Prabowo

RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui Wamildan Tsani Panjaitan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia (GIAA) menggantikan Irfan Setiapatra yang menjabat sejak tahun 2020 lalu.

Berdasarkan hasil RUPSLB, Irfan Setiapatra diberhentikan dengan hormat dari jabatan direktur utama. Selanjutnya, RUPSLB mengangkat Wamildan Tsani Panjaitan menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia.

Wamildan mengaku pengangkatannya sebagai Direktur Utama Maskapai Pelat Merah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau mau disampaikan tugas khusus, ya saya mendapatkan instruksi langsung dari bapak Presiden, dan kemarin juga saya sudah di briefing langsung oleh pak Menteri BUMN. Artinya kita harus tergak lurus, kita laksanakan tugas dari pimpinan," kata Wamildan di Auditorium Gedung Manajemen Garuda, Tangerang, Jumat (15/11/2024).

Meski demikian, Wamildan bukan orang baru industri penerbangan. Riwayat kariernya sudah sempat menduduki jabatan strategis di perusahaan maskapai terbesar, Lion Air Group.

Profil Wamildan Tsani

Wamildan Tsani Panjaitan lahir pada tahun 1981 di Wamena dan menghabiskan masa kecilnya di Jayapura. Sejak kecil, ia menunjukkan minat yang besar terhadap dunia penerbangan.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Taruna Nusantara pada tahun 1998, Wamildan melanjutkan jalur pendidikannya di Akademi Angkatan Udara (AAU) dan lulus dari Air Force Flying School pada tahun 2003. Sebagai seorang lulusan militernya, ia mendapatkan dasar yang kuat untuk membangun karir di industri penerbangan.

Pendidikan Wamildan tidak hanya mencakup pendidikan formal di AAU, tetapi juga pelatihan yang memadai yang mempersiapkannya untuk karir di bidang penerbangan.

Penyelesaian berbagai kursus, termasuk Aviation Medicine Course di Angkatan Udara Singapura dan Instructor Course di Angkatan Udara Australia, memberikan Wamildan tenaga tambahan untuk menjalankan

tugasnya sebagai pilot dan instruktur penerbangan.

Semua pelatihan ini membekalinya dengan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola berbagai aspek kompleks dalam dunia penerbangan.

Karir profesional Wamildan dimulai ketika ia bergabung dengan TNI Angkatan Udara sebagai pilot pesawat patroli maritim Boeing 737-200 pada tahun 2003.

Tugas ini menuntut tingkat kedisiplinan dan keterampilan tinggi, serta pemahaman yang mendalam tentang operasi penerbangan.

Di samping itu, Wamildan juga menjalankan tugas sebagai instruktur penerbang di Lanud Adisucipto Yogyakarta, di mana ia membimbing dan melatih pilot-pilot muda, membagikan pengetahuan dan pengalamannya.

Di luar pendidikan dan karir militernya, Wamildan Tsani terlibat dalam pelatihan internasional yang meningkatkan pemahaman dan keterampilannya.

Pelatihan di Squadron Officer School di AS telah memberikan perspektif global yang lebih luas mengenai manajemen penerbangan dan teknik-teknik mutakhir di bidang penerbangan.

Perjalanan Wamildan Tsani di TNI Angkatan Udara

Sebagai pilot dalam TNI Angkatan Udara, Wamildan Tsani bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan misi-misi strategis yang dilaksanakan dengan pesawat patroli.

Dari tahun 2003 hingga 2013, Wamildan menjabat sebagai Flying Instructor di Sekolah Penerbang. Dalam perannya ini, ia tidak hanya mengajarkan teknik penerbangan, tetapi juga menekankan pentingnya keselamatan dan prosedur yang ketat.

Keterampilan ini sangat penting, mengingat pelatihan yang diajarkan mencakup pilot yang akan terjun ke penerbangan sipil. Keberhasilan dalam peran ini membuktikan kapabilitasnya sebagai pemimpin dan pengajar yang diakui.

Perjalanan Karir Wamildan Tsani di Lion Air dan Batik Air

Setelah meninggalkan dinas militer, Wamildan bergabung dengan

Batik Air pada tahun 2013 sebagai Director of Safety, Security, and Quality.

Dalam posisi ini, ia bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan serta standar keselamatan di maskapai tersebut. Kepemimpinannya berkontribusi pada reputasi Batik Air sebagai salah satu maskapai full service terbaik di Indonesia.

Pada tahun 2022, Wamildan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Lion Air. Di sini, ia menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama dalam meningkatkan jaringan terbang dan performa maskapai di pasar yang sangat kompetitif.

Kontribusinya di Lion Air sangat terlihat, terutama dalam hal manajemen operasional dan pemeliharaan standar keselamatan yang tinggi.

Di bawah kepemimpinan, Lion Air terus berkembang baik dari segi jumlah penumpang serta

ekspansi rute. Wamildan menempatkan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama dan meningkatkan sistem keamanan.

Keberhasilan ini menarik perhatian dalam industri penerbangan, memberi Wamildan reputasi sebagai pemimpin yang kompeten dan inovatif.

Perjalanan karir Wamildan Tsani dari pilot hingga menjadi bos Garuda Indonesia menggambarkan dedikasi dan komitmennya terhadap industri penerbangan Indonesia.

Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang luas, Garuda Indonesia berada di tangan yang tepat untuk memasuki era baru yang penuh harapan dan tantangan. (nei,ist/dya)



KASUS GONDONGAN DI RI LAGI 'NGEGAS', CATAT CARA OBATI DAN CEGAH

GONDONGAN merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus paramyxovirus. Virus ini dapat menyebar dengan cepat kepada orang lain melalui percikan air ludah atau air liur penderita gondongan saat bersin dan batuk.

Kasus gondongan di Indonesia baru-baru ini mengalami peningkatan. Banyak anak-anak hingga remaja dilaporkan terjangkit penyakit ini, disebabkan oleh infeksi virus pada kelenjar ludah. Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengungkapkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah kasus gondongan (mumps) pada anak di beberapa wilayah, kondisi tersebut masih dapat terkendali.

"Peningkatan kasus terjadi di beberapa daerah, namun situasi saat ini masih terkendali," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemkes, Aji Muhawarman, yang dikutip dari Antara pada Sabtu (16/11/2024). Dikutip dari Medical News Today, gondongan merupakan infeksi virus yang sangat menular pada kelenjar ludah, yang sering menyerang anak-anak.

Gejala paling khas dari penyakit ini adalah pembengkakan kelenjar ludah, sehingga wajah pengidap terlihat membesar di bagian pipi. Kelenjar ludah yang biasanya terpengaruh adalah kelenjar parotis. Dalam beberapa hari, gejala khas gondongan mulai terlihat, seperti nyeri dan pembengkakan kelenjar parotis, salah satu dari tiga kelompok kelenjar ludah, yang menyebabkan pembengkakan pipi.

Meski jarang, gondongan juga dapat menyerang orang dewasa. Pada kasus ini, gejala biasanya serupa, tetapi terkadang lebih parah dengan risiko komplikasi yang lebih tinggi. Karena disebabkan oleh virus, gondongan tidak dapat diatasi dengan antibiotik, dan hingga saat ini belum ada obat antivirus yang spesifik untuk mengobatinya.

Penanganan yang tersedia hanya bertujuan meredakan gejala hingga infeksi mereda, serupa dengan cara tubuh melawan flu. Sebagian besar pengidap gondongan sembuh dalam waktu sekitar dua minggu. Pencegahan gondongan yang paling efektif adalah melalui vaksinasi. Vaksin gondongan

dapat diberikan secara terpisah atau sebagai bagian dari vaksin MMR yang juga melindungi dari rubella dan campak. Vaksin MMR biasanya diberikan kepada bayi berusia di atas satu tahun, lalu diulang sebelum memasuki usia sekolah. Selain itu, untuk mencegah penyebaran infeksi, beberapa tindakan pencegahan dapat dilakukan, seperti:

1. Gunakan masker

Penularan virus penyebab gondongan dapat terjadi melalui percikan air ludah atau air liur penderitanya saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk mencegah penularan dan tertular virus tersebut, penderita mau pun orang sehat dianjurkan menggunakan masker, terutama di tempat umum.

Pastikan masker yang digunakan memiliki daya lindung yang kuat. Hal ini untuk menurunkan risiko penularan virus melalui droplet.

2. Cuci tangan secara rutin

Secara tidak sadar, Anda mungkin suka menyentuh benda atau barang di sekitar. Anda pun tidak tahu apakah benda tersebut telah terkontaminasi virus atau tidak, termasuk virus penyebab gondongan.

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum atau sesudah makan, setelah keluar dari toilet, atau setelah menyentuh benda dan barang di sekitar. Cuci tangan yang tepat perlu dilakukan selama kurang lebih 40 detik dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir.

3. Gunakan hand sanitizer

Bila sedang bepergian dan tidak ada air untuk mencuci tangan, Anda dapat menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif guna mencegah penularan virus dan bakteri, termasuk virus penyebab gondongan.

Sebelum membelinya, pastikan hand sanitizer mengandung kadar alkohol setidaknya 60%. Hal tersebut untuk membunuh virus dan bakteri penyebab penyakit.

4. Hindari berbagi pakai barang pribadi

Cara mencegah

gondongan selanjutnya adalah tidak berbagi pakai barang pribadi dengan orang lain. Barang pribadi tersebut bisa berupa piring, sendok, gelas, atau sikat gigi. Pasalnya, virus penyebab gondongan sangat mudah menular melalui percikan air ludah atau air liur. Tidak hanya saat penderita gondongan bersin atau batuk, percikan air ludah atau air liur tersebut juga dapat menyebar ketika menggunakan barang pribadi dengan orang lain.

5. Tingkatkan daya tahan tubuh

Untuk meminimalisasi infeksi paramyxovirus penyebab gondongan, Anda perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan guna meningkatkan imunitas tubuh

6. Dapatkan vaksinasi

Meningkatkan daya tahan tubuh juga dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Selain itu, pemberian vaksin ini juga menjadi cara mencegah gondongan yang paling efektif. Untuk anak-anak, vaksin yang diberikan berupa vaksin MMR.

Vaksin ini berguna melindungi tubuh dari penyakit campak, gondongan, dan rubella. (nei,ist/dya)





Casio Ciptakan Jam Cincin dengan Ukuran Hanya 1 Inchi



MERЕК legendaris Casio kembali membuktikan keunggulannya dalam dunia jam tangan digital dengan merilis CRW-001-1JR, jam tangan berbentuk cincin yang menghadirkan inovasi dan desain retro-modern. Produk itu menjadi ajang bagi Casio untuk menunjukkan mereka mampu bersaing dengan cincin pintar lainnya.

Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke 50 tahun, Casio merilis jam cincin berukuran 1 inci saja.

Jam cincin dengan tipe CRW-001-1JR akan tersedia di Jepang mulai bulan Desember dengan harga ¥19,800, atau sekitar US\$128 atau setara dengan Rp2 jutaan.

Dilansir dari Theverge, meskipun

casings jam tangan mungil ini hanya berukuran satu inci, Casio telah berhasil memasukkan layar LCD enam segmen retro yang dapat menampilkan jam, menit, dan detik.

“Layar LCD-nya sangat jelas, meskipun ukurannya kecil,” ujar seorang pengamat teknologi di Tokyo.

Cincin ini juga dilengkapi tiga tombol fungsional yang dapat mengontrol fitur tambahan seperti menampilkan tanggal atau waktu dalam zona waktu berbeda, dan stopwatch.

Layar jam tangan berdering bahkan memiliki lampu dan fungsi alarm yang akan mem-flash layar alih-alih mengeluarkan suara yang

terdengar.

Hal ini membuat jam ini cocok untuk situasi yang membutuhkan kesunyian, seperti saat rapat atau di perpustakaan.

Jam ini ditenagai oleh satu baterai yang menurut Casio akan membuat jam tangan tahan air ini tetap berfungsi selama sekitar dua tahun, tetapi juga mudah diganti jika sudah mati.

Casio mengatakan perangkat wearable tersebut diproduksi sebagai satu bagian menggunakan proses pencetakan injeksi logam yang dimulai dengan bubuk logam. Hasilnya, tidak seperti cincin jam tangan Timex yang dilengkapi tali jam yang dapat diregangkan untuk mengakomodasi berbagai pengguna, CRW-001-1JR secara permanen berukuran 10,5 AS.

Jika jari Anda lebih kecil dari itu, Casio menyertakan beberapa spacer untuk meningkatkan kesesuaiannya. Jika jari Anda lebih besar dari itu, Anda perlu mencari cara lain untuk memeriksa waktu.

Tahun lalu, Casio merilis koleksi jam tangan cincin yang menampilkan desain yang terinspirasi oleh beberapa jam tangan digital paling ikonik milik perusahaan selama 50 tahun terakhir.

Sebelumnya, Timex meluncurkan

produk serupa, tetapi Casio berhasil mengunggulinya dengan menambahkan lebih banyak fitur dan daya tahan lebih baik.

Casio tidak hanya berhenti di sini. Melihat keberhasilan CRW-001-1JR, kemungkinan besar perusahaan ini akan terus mengembangkan perangkat wearable lainnya. (nei,ist/dya)



DESTINASI KULINER ASIA, SURGA BAGI PECINTA CITA RASA AUTENTIK

ASIA adalah surga kuliner dengan hidangan beragam, mulai dari street food hingga menu berkelas. Setiap negara menyajikan cita rasa unik yang mencerminkan budaya dan tradisi, menjadikan perjalanan kuliner di Asia lebih dari sekadar mencicipi makanan.

Asia menawarkan ragam hidangan yang mencerminkan bagaimana kekayaan alam melalui berbagai varian rasa. Mulai dari sajian pedas hingga yang manis, setiap negara memiliki rasa autentik yang khas. Hal ini menjadikan Asia sebagai destinasi utama bagi mereka yang ingin merasakan sensasi kuliner berbeda. Setiap gigitan membawa sensasi tersendiri yang membuat pengalaman makan lebih dari sekadar mengenyangkan perut.

Sebuah studi mensurvei lebih dari 4.000 orang setelah mereka menyelesaikan pemesanan ke berbagai negara tujuan. Studi ini mengungkap destinasi teratas di Asia yang dikunjungi wisatawan khusus untuk menikmati kuliner. Korea Selatan memimpin daftar indengan oersentase 64%, disusul oleh Taiwan dengan persentase 62% Thailand dengan persentase 55%, Jepang dengan persentase 52%, dan Malaysia dengan persentase 49%.

Gede Gunawan—seorang Senior Country Director di Agoda Indonesia—pernah mengungkapkan, “makanan lebih dari sekadar kebutuhan namun juga merupakan pengalaman budaya.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa wisata kuliner adalah cara terbaik untuk lebih dekat dengan identitas suatu tempat. Dari Korea Selatan hingga Malaysia, berikut adalah lima destinasi kuliner di Asia yang wajib dijelajahi.

Korea Selatan

Korea Selatan telah lama menjadi magnet bagi wisatawan kuliner. Mengapa demikian? Hal itu karena Korea Selatan memiliki cita rasa yang memikat dan kaya akan bumbu. Selain itu, popularitas drama dan film Korea sering kali menampilkan pengalaman kuliner unik. Mulai dari kimchi, ganjang gejang, chodang sundubu, hingga barbeku ala Korea, yang terkenal diseluruh dunia.

Selain makanan yang telah mendunia, wisatawan bisa menemukan pengalaman kuliner yang lebih autentik di pasar-pasar tradisional.

Pasar Gwangjang di Seoul adalah salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Di sana, wisatawan bisa mencicipi tteokbokki, kue beras pedas yang digemari banyak orang, serta bindaetteok, pancake gurih yang terbuat dari kacang hijau.

Di Pulau Jeju, wisatawan bisa menikmati hidangan seafood segar yang dipadukan dengan heukdwaeji, babi hitam khas Jeju yang dimasak dengan teknik tradisional Korea.

Taiwan

Taiwan dikenal dengan pasar malamnya yang ramai dan penuh dengan makanan lezat. Mulai dari stinky tofu yang terkenal hingga bubble tea yang mendunia. Taiwan adalah destinasi kuliner yang memadukan tradisi kuno dengan inovasi modern.

Pasar Shilin dan Raohe di Taipei menjadi sorotan bagi wisatawan yang ingin menikmati berbagai makanan kaki lima yang autentik. Di Taiwan, wisatawan bisa merasakan hidangan

tradisional, seperti mie danzai dan sup ikan bandeng. Selain itu, budaya minum teh di Taiwan juga sangat kuat, dengan teh oolong Alishan yang menjadi favorit banyak orang, khususnya para pecinta the.

Thailand

Thailand telah lama dikenal sebagai salah satu negara dengan budaya street food yang kuat. Bangkok—dengan kawasan Yaowarat yang dikenal sebagai Pecinan—menjadi salah satu tujuan utama bagi para pecinta kuliner. Di sini, berbagai hidangan lezat, seperti pad thai, crispy pork belly, dan mango sticky rice dapat dinikmati dengan harga terjangkau.

Selain itu, Thailand juga menawarkan hidangan kari yang kaya akan rempah. khao soy—mie kari khas Chiang Mai dari utara Thailand—menjadi salah satu hidangan yang wajib dicoba. Di bagian selatan, khanom jeen—mie beras fermentasi yang disajikan dengan berbagai kari pedas—menawarkan pengalaman kuliner yang membakar lidah namun tetap memikat.

Jepang

Jepang adalah surga bagi para pecinta makanan, mulai dari sushi hingga ramen. Tokyo—sebagai pusat kuliner dunia—menawarkan berbagai hidangan lezat yang menggugah selera. Salah satunya adalah pasar Tsukiji—tempat yang tepat untuk menikmati sushi dan sashimi segar. Sementara itu, di area Shinjuku dan Ginza, wisatawan bisa mencicipi takoyaki dan yakitori yang menjadi camilan favorit banyak orang.

Di Hokkaido, kepiting segar dan

hidangan laut lainnya menjadi primadona. Sementara itu, bagi para pecinta ramen, Fukuoka adalah tempat yang harus dikunjungi untuk mencoba ramen tonkotsu yang terkenal dengan kaldu pork kentalnya. Setiap sudut Jepang menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda. Hal itu menjadikan Jepang sebagai destinasi kuliner yang sangat lengkap.

Malaysia

Malaysia menawarkan ragam hidangan yang mencerminkan warisan multikulturalnya. Di Kuala Lumpur, nasi lemak menjadi salah satu hidangan nasional yang paling terkenal. Hidangan ini disajikan dengan nasi yang dimasak menggunakan santan, sambal pedas, dan lauk pauk yang bervariasi, seperti ayam goreng berempah yang kaya akan bumbu.

Selain itu, Penang dikenal sebagai pusat makanan jalanan dengan hidangan, seperti char kway teow dan hokkien mee, yang populer di kalangan wisatawan. Di Malaysia Timur, Kota Kinabalu dan Kuching, menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dengan hidangan khas, seperti hinava dan manok pansoh yang mencerminkan warisan budaya lokal.

Asia adalah surga kuliner yang tak boleh dilewatkan. Setiap negara memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang siap memanjakan lidah dan menggugah selera. Seperti yang dikatakan oleh Gede Gunawan, kuliner adalah pengalaman budaya, dan melalui makanan, wisatawan dapat lebih mengenal suatu tempat. Jadi, bagi yang gemar berpetualang menjelajahi jejak rasa. (nei,ist/dya)

KOREA SELATAN



TTEOKBOKKI

TAIWAN



SUP IKAN BANDENG

THAILAND



CHIANG MAI

JEPANG



RAMEN

MALAYSIA



NASI LEMAK

Tom Lembong ... (dari Hal 1)

KUBU eks Mendag Thomas Trikasih Lembong mempertanyakan status tersangka yang ditetapkan Kejagung berkaitan kasus impor gula. Sebab, Lembong bukan satu-satunya menteri perdagangan era Presiden Jokowi yang melakukan importasi gula

Adapun kelima menteri yang dimaksud adalah Rachmad Gobel (2014-2015), Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022), dan Zulkifli Hasan (2022-2024).

Tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi Abdulkadir, meyakini menetapkan tersangka kliennya adalah bentuk kesewang-wenangan yang dilakukan oleh Kejagung.

"Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan termohon terhadap lima Menteri Perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan kesewang-wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap pemohon," ucap Abdul saat membacakan point gugatannya di PN Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Menurutnya, pengusutan kasus tersebut dimulai sejak tahun 2015-2023 jika mengacu pada sprindik-nya. Hanya saja, Kejagung tidak pernah memeriksa kelima menteri lainnya dalam kasus tersebut. Hanya dilakukan pada Lembong seorang.

"Sampai dengan saat ini termohon belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya, bahkan sudah membuat pernyataan di media, tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya," tegas dia.

Kuasa hukum Tom yang lain, Zaid Mushafi menyatakan kebijakan impor gula telah diafirmasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016.

"Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh presiden selaku kepala negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah," kata Zaid saat membacakan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Zaid menyebut kebijakan impor gula yang dibuat Tom Lembong juga merupakan ranah hukum administrasi bukan tindak pidana.

"Bahwa pada faktanya kebijakan impor gula pada masa kepemimpinan pemohon sebagai Menteri Perdagangan (policy maker) adalah ranah hukum administrasi negara sehingga perbuatan pemohon dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana," ujar Zaid.

Menurut Zaid, Kejaksaan Agung dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya memastikan perbuatan yang disangkakan adalah

perbuatan orang atau korporasi.

Dalam hal orang perseroangan, maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan.

Apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara a quo, terang Zaid, Kejaksaan Agung menasar pada kebijakan Tim Lembong semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015-Juli 2016.

Zaid menjelaskan kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum sebagaimana Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan.

"Dalam hal ini penetapan permohonan sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan domain hukum pidana," ujarnya.

Zaid menambahkan penahanan terhadap Tom Lembong juga tidak berdasarkan alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP.

"Dengan demikian, syarat objektif penahanan berupa "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup" tidak terpenuhi dan tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon," kata Sugito.

Atas dasar alasan tersebut, kuasa hukum Tom Lembong meminta hakim tunggal Tumpunuli Marbun menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah dan harus batal demi hukum. Kuasa hukum juga meminta nama baik Tom Lembong direhabilitasi atau dipulihkan.

Soal Kehadiran Tom Lembong

Di sisi lain, Hakim tunggal sidang praperadilan eks Menteri Perdagangan, Thomas Lembong alias Tom Lembong, Tumpunuli Marbun menyarankan pengacara Tom Lembong berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Saran itu disampaikan usai pengacara Tom Lembong meminta kliennya untuk dihadirkan selama persidangan berlangsung.

"Untuk menghadirkan pemohon adalah tanggung jawab termohon (Kejagung), (tapi) itu tidak ada landasan hukum untuk (Tom Lembong) hadir," kata Tumpunuli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

"Pemohon (Thomas Lembong/tim kuasa hukum) bisa berkordinasi, silakan dilaksanakan saja," lanjut Tumpunuli.

Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengaku, telah mengajukan surat kepada Hakim Ketua PN Jaksel terkait dengan izin menghadirkan Tom Lembong dalam sidang. Atas saran hakim tersebut, tim kuasa hukum memastikan akan segera berkordinasi dengan Kejagung

agar Tom Lembong bisa dihadirkan dalam sidang peaperadilan selanjutnya.

"Kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan," ujar Ari.

"Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom dalam persidangan ini," tambah dia.

Ari menegaskan, kehadiran Tom Lembong penting. Sebab, Tom Lembong adalah pihak yang mengetahui proses pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Saat pemeriksaan pun bahkan Tom tak didampingi kuasa hukum.

"Pak Tom yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita (kuasa hukum) semua tidak ada yang hadir hanya Pak Tom sendiri," tegas Ari.

Sementara itu, Hakim Tumpunuli menegaskan bahwa izin untuk menghadirkan Tom Lembong dalam sidang praperadilan bukan merupakan tugas pengadilan. "Kepentingan menghadirkan "prinsipal" kami bukan kapasitasnya. Kalau mau kordinasi dengan kejaksaan," tegas Hakim Ketua.

Kejagung mempertanyakan urgensi dibalik permintaan menghadirkan Tom Lembong yang sudah menjadi tersangka dan ditahan.

"Urgensinya apa?" kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2024).

Harli belum menjelaskan lebih jauh mengenai ada tidaknya koordinasi dari pengacara Tom Lembong perihal itu. Dia hanya mengatakan pihaknya akan mengikuti proses sidang praperadilan yang tengah berlangsung.

Dia pun menampik tuduhan berbuat sewenang-wenang. "Di mananya abuse of power? Penetapan tersangkanya sudah sesuai hukum acara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," ujarnya

Ia mengatakan penyidik akan menjelaskan seluruh proses penyelidikan hingga penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Harli Siregar mengatakan pengusutan kasus tom lembong lantaran di tahun tersebut diketahui bahwa Indonesia surplus gula, namun Kemendag memberikan izin.

"Ya kan? Nah, 2015 itu sudah jelas ada rapat bahwa kita surplus gula, tapi diberikan izin. Itu dia mulai terbuka PMH-nya," kata Harli.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), impor gula bukanlah hal baru dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Selepas Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan, beberapa menteri pengganti Tom juga melakukan hal sama.

Dimulai saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri

Perdagangan tahun 2015, periode awal Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Di tahun itu, Tom Lembong menghadapi situasi di mana kebutuhan gula nasional terus meningkat.

Tahun itu, impor gula tercatat sebesar 3,37 juta ton. Setahun kemudian, pada 2016, impor gula melonjak signifikan hingga mencapai 4,74 juta ton.

Setelah Tom Lembong purna tugas sebagai Menteri Perdagangan akibat kena reshuffle, posisinya digantikan oleh Enggartiasto Lukita.

Pada pertengahan 2016 hingga tahun 2019. Di masa kepemimpinan Enggar, tren impor gula tetap tinggi. Misalnya di tahun 2017, impor gula mencapai 4,48 juta ton. Sumber utama impor ini berasal dari Australia, Thailand, Brasil, dan Korea Selatan. Satu tahun kemudian, impor gula kembali mengalami peningkatan menjadi 5,02 juta ton. Jumlah ini menandakan bahwa kebutuhan gula nasional masih harus dipenuhi dengan impor dalam jumlah besar.

Selanjutnya, di tahun 2019 yang mana merupakan tahun terakhir Enggar menjabat, impor gula sedikit menurun menjadi 4,09 juta ton. Namun, sumber impor gula semakin beragam, meliputi India, Australia, Thailand, Korea Selatan, dan Jerman.

Impor gula masih berlanjut di masa jabatan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.

Saat Agus menjabat pada 2019 hingga 2020, impor gula masih diperlukan guna mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan Agus pun melanjutkan tren impor dari periode-periode sebelumnya.

Pada tahun 2020 impor gula mencapai 5,53 juta ton. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Menggantikan Agus, Muhammad Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 2020 hingga 2022. Selama masa jabatannya, volume impor gula masih berada pada angka tinggi.

Tahun 2021, impor gula mencapai 5,48 juta ton. Kemudian pada tahun 2022, impor gula mencapai titik tertinggi selama satu dekade terakhir, yaitu sebesar 6 juta ton. Namun, saat itu Lutfi hanya menjabat hingga pertengahan 2022 sebelum digantikan oleh Zulkifli Hasan.

Di masa Zulkifli Hasan, atau yang dikenal dengan sebutan Zulhas, tahun 2022 tren impor gula tetap bertahan pada angka tinggi, meski ada sedikit penurunan.

Tahun 2023, impor gula tercatat sebesar 5,06 juta ton. Berdasarkan data yang ada, Januari hingga September 2024, impor gula tercatat sebesar 3,66 juta ton. Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, angka ini berpotensi untuk meningkat lagi.

Meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya, kebijakan Zulhas dalam mengimpor gula tetap mendapat sorotan, terutama dari perspektif ketahanan pangan dan keberlanjutan produksi gula dalam negeri. (wid, rls, din, ant/dya)



DPRD Surabaya Godok Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif ADI SUTARWIJONO HARAP MASYARAKAT TERFASILITASI DAN BISA TINGKATKAN KESEJAHTERAAN



Suasana rapat DPRD Kota Surabaya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) pada Senin (18/11/2024). (Amanah/Lenteratoday)

SURABAYA - DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan wali kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Senin (18/11/2024).

"Yang pasti untuk misinya adalah memperkuat, memberikan wahana yang seluas-luasnya bagi ekonomi kreatif di Kota Surabaya," ujar Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono usai mendengarkan paparan Sekda Kota Surabaya Ikhsan mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani.

Diketahui, ekonomi kreatif bukan hanya mencakup aspek seni dan budaya, tetapi juga sektor-sektor yang mendukung inovasi, teknologi, dan kewirausahaan yang melibatkan masyarakat luas.

"Supaya berkembang di Kota Surabaya dengan berbagai varian di kluster ekonomi kreatif itu. Kemudian pemerintah juga memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut," tegasnya.

Diketahui, pemerintah menetapkan 17 subsektor pada Bidang Ekraf yaitu pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film, animasi dan video,

fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi.

Dia mengatakan, dalam kegiatan paripurna kali ini, pihaknya masih mendengarkan penjelasan terkait Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif.

"Hari Rabu nanti akan ada jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Soal kontennya, setelah itu kemudian kita bahas seperti membahas yang lain," kata politisi PDIP ini.

Meski demikian, ia menyakini sektor ekonomi kreatif mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sehingga nantinya bila sudah menjadi Perda, Adi berharap ekonomi kreatif di Surabaya bisa semakin menggeliat dan masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik.

"Tentu di DPRD akan berbicara dalam konteks itu untuk memberikan support dan dukungan warga masyarakat," jelanya.

Diakuinua, dalam pengembangan ekonomi kreatif perlu adanya ruang

sarana prasarana dan pendampingan berkelanjutan agar bisa semakin berkembang.

"Inisiatif-inisiatif di warga masyarakat nanti diberikan ruang. Berikan ruang dan kemudian ekonomi kreatif itu akan tumbuh di Kota Surabaya," harapnya.

Terkait isi dari Raperda itu, Adi menyebut, nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut oleh panitia khusus (Pansus). Baik isi dari Raperda hingga modal yang akan digunakan.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan bahwa Raperda pengembangan ekonomi kreatif didasarkan pada potensi ekonomi kreatif yang ada di Surabaya.

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, ekonomi kreatif menawarkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan peningkatan ekspor produk-produk bernilai tambah.

"Oleh karena itu, perlu dikembangkan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi warga di Kota Pahlawan," kata Ikhsan. (Adv,Ama/Dya)

“

Yang pasti untuk misinya adalah memperkuat, memberikan wahana yang seluas-luasnya bagi ekonomi kreatif di Kota Surabaya. Supaya berkembang di Kota Surabaya dengan berbagai varian di kluster ekonomi kreatif itu. Kemudian pemerintah juga memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut,"



Adi Sutarwijono
KETUA DPRD KOTA SURABAYA